

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Pembukaan UUD, 1945).

Pembangunan dalam lingkup spasial tidak selalu berlangsung secara merata. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat, sementara daerah yang lain sebaliknya. Perbedaan akselerasi pertumbuhan antar daerah ini diantaranya disebabkan oleh perbedaan dalam ketersediaan sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang yang lain.

Perencanaan pembangunan pada suatu wilayah akan semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pembangunan yang dilaksanakan dalam penyediaan sarana dan prasarana kota. Adanya perkembangan sarana dan prasaran banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain geografi wilayah, sumber daya atau potensi alam, kebijakan pemerintah, investasi baik lokal maupun asing, komunikasi, transportasi dan perkembangan sarana dan prasarana.

Demikian pula dengan pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonomi sebagai salah satu faktor dalam pembangunan, dimana dengan adanya kelengkapan fasilitas pelayanan maka suatu daerah dapat dikatakan berkembang sehingga dalam hal ini fasilitas pelayanan sosial ekonomi merupakan fasilitas yang menjadi kebutuhan penduduk pada suatu wilayah dan dapat mendukung perkembangan wilayah.

Fasilitas sosial ekonomi merupakan fasilitas pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat dan sekaligus sebagai faktor utama dalam memperlancar proses pembangunan. Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi tidak terlepas dengan jumlah penduduk yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Penyediaan fasilitas yang memadai dan layak diharapkan mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Penyediaan fasilitas tidak mampu memenuhi permintaan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tiap tahun. Sehingga muncul perspektif bahwa fasilitas merupakan kendala bagi pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya memiliki potensi yang cukup tinggi. Faktor *pertama*, yang membatasi pembangunan fasilitas adalah keterbatasan dana pemerintah. *Kedua*, standar kelayakan penduduk disamping juga memperkecil kesenjangan antara permintaan dan penyediaan. *Ketiga*, kenaikan permintaan sebagai akibat meningkatnya kegiatan ekonomi. *Keempat*, banyaknya fasilitas pelayanan di Indonesia yang memerlukan peningkatan kualitas (Sri Handoko, 1994 dalam Hasanudin, 2009).

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah yang secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Sragen :

Sebelah Timur	Kabupaten Ngawi (propinsi Jawa Timur)
Sebelah Barat	Kabupaten Boyolali
Sebelah selatan	Kabupaten Karanganyar
Sebelah Utara	Kabupaten Grobogan

Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km² yang terbagi dalam 20 kecamatan, 208 kelurahan dan desa. Secara fisiologis, wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas 40.037,93 Ha (42,52%) lahan basah dan 54.117,88 Ha (57,48%) lahan kering (BAPPEDA 2010).

Dilihat dari segi demografi Kabupaten Sragen mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2006 sebesar 863,914 jiwa, tahun 2007 sebesar 867,572 jiwa, tahun 2008 sebesar 871,951 jiwa, tahun 2009 sebesar 876,402 jiwa, dan pada tahun 2010 sebesar 883,464 jiwa (BAPPEDA 2010).

Sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, harus pula diikuti dengan distribusi fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang merata sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Di Kabupaten Sragen belum terdapat adanya keseimbangan antara ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dengan jumlah penduduk agar sesuai dengan kebutuhannya.

Hal ini disebabkan karena masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang dalam penyediaan fasilitas sosial ekonomi. Untuk itu perlu adanya evaluasi, arahan dan pengembangan agar kebutuhan dan tingkat daya layan fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Sragen mencukupi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis sangat tertarik mengadakan penelitian dengan tema **“EVALUASI KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN SRAGEN”**.

Tabel 1.1 Wilayah Pembangunan Daerah, Luas dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sragen Tahun 2010/2011

No	Unit Kawasan	Nama Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk	
				2010	2011
1.	SWP I	Sragen	2.727	65.816	66.321
		Karangmalang	4.298	58.331	59.002
		Masaran	4.404	65.790	66.091
		Ngrampal	3.440	36.359	36.335
		Sidoarjo	4.589	51.169	51.511
		Sambirejo	4.843	37.135	37.394
		Kedawung	4.978	59.817	60.142
		Gondang	4.117	43.653	43.898
		Sambungmacan	3.848	44.073	44.425
2.	SWP II	Gemolong	4.023	47.398	48.322
		Sumberlawang	7.516	45.609	45.822
		Tanon	5.100	54.849	55.069
		Miri	5.381	32.703	33.017
		Plupuh	4.836	46.296	46.088
		Kalijambe	4.496	46.640	47.289
3.	SWP III	Tangen	5.513	27.151	27.233
		Mondokan	4.936	34.341	34.548
		Gesi	3.958	21.848	21.890
		Jenar	6.397	26.884	27.031
		Sukodono	4.555	31.540	32.016
Jumlah			95.155	877.402	883.464

Sumber : Sragen Dalam Angka Tahun 2011

**Tabel 1.2 Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi di Kabupaten Sragen
Tahun 2010**

No	Jenis	Fasilitas	Jumlah
1.	Fasilitas pelayanan sosial	Pendidikan a. TK b. SD c. SLTP d. SLTA Kesehatan a. Balai Pengobatan b. BKIA/R.S Bersalin c. Puskesmas d. Puskesmas Pembantu e. RSU f. Apotek Tempat Ibadah, Jasa dan Kantor Pemerintah a. Masjid b. Musholla c. Gereja d. Pura e. Wihara f. Kantor Pos g. Kantor Telepon h. Balai Pemerintahan	545 590 87 68 42 29 25 63 5 12 1.735 2.551 75 12 1 20 3 208
2.	Fasilitas pelayanan ekonomi	Ekonomi a. Pasar b. Warung c. Toko d. Kios e. Bank f. Koperasi	106 5.101 6.666 5.226 31 1.040

Sumber : Pengolahan Data Sekunder

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan ketersediaan pelayanan fasilitas sosial ekonomi pada setiap kecamatan di daerah penelitian?
2. Apakah faktor yang menyebabkan perbedaan ketersediaan pelayanan fasilitas sosial ekonomi di daerah penelitian?
3. Bagaimana hubungan antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dengan tingkat perkembangan wilayah di daerah penelitian?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui tingkat daya layan fasilitas sosial ekonomi di tiap-tiap kecamatan di daerah penelitian.
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan ketersediaan pelayanan fasilitas sosial ekonomi di daerah penelitian.
3. Mengetahui hubungan atara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi terhadap tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Sragen.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana wilayah.
2. Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

1.5 Telaah Pustaka

Geografi memandang bumi sebagai habitat manusia yaitu tempat tinggal manusia. Habitat yang terdiri dari bingkai alami (*physical setting*) dan bingkai insani (*human setting* atau *culture setting*) (Daldjoeni IV, 1982). Definisi tersebut menjelaskan bawa geografi tidak hanya memandang dan

mempelajari aspek bumi saja melainkan mempelajari aspek manusianya baik yang bercorak politik, ekonomi, sosial maupun *culture relegius*.

Untuk memahami wilayah baik potensi, permasalahan, prospek dan kecenderungan perkembangan maupun berbagai kemungkinan perubahan yang dapat terjadi, dapat dilakukan melalui berbagai segi atau berbagai kepentingan. Secara umum untuk kepentingan tersebut diperlukan pemahaman yang cukup memadai terhadap konsepsi wilayah dan pewilayahan, pemahaman terhadap variabel-variabel yang diperlukan, kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan model-model serta penguasaan analisis wilayah baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Yunus, 1991).

Fenomena manusia tersebut ditelaah dengan latar belakang lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sedangkan fenomena yang tidak terlepas dari wilayah *setting* atau wadah adalah keberadaan manusia dengan segala aktivitas hidup dengan penyediaan fasilitas sosial ekonomi.

Salah satu bagian pembangunan adalah pembangunan fasilitas sosial ekonomi terutama bagi penduduk di daerah pedesaan. Pembangunan fasilitas tersebut dimaksudkan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pelayanan penduduk pedesaan untuk persatuan desa dan kota sebagai bentuk sistem pusat dengan daerah belakangnya (*hinterland*) secara efisiensi sesuai dengan fungsi serta mobilitas penduduk untuk memperoleh fasilitas jasa dan kesempatan sosial ekonomi (Budhy Tjahyatti, 1982 dalam Fajarina W, 2008).

Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi turut berpengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah. Evaluasi fasilitas terhadap hirarkhi pelayanan merupakan bagian dari analisis regional, khususnya yang menyangkut tentang sentralitas regional. Metode pengukuran fasilitas pelayanan sosial ekonomi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori (Muta'ali, 2000, dalam Haryanto, A.T, 2006).

1. Ketersediaan pelayanan (*service availability*) adalah mengukur ada atau tidaknya suatu fasilitas pelayanan.

2. Tingkat pelayanan (*size of availability*) adalah mengukur suatu jumlah fasilitas pelayanan.
3. Fungsi ketersediaan atau daya layan (*function of availability*) adalah perbandingan antara ketersediaan fasilitas pelayanan dengan variabel pembanding standar.

Huisman (1997) mengungkapkan bahwa pengagihan pelayanan merupakan salah satu kebijaksanaan pembangunan keruangan untuk meningkatkan pertumbuhan pusat-pusat pelayanan yang dapat menghubungkan pusat kota dengan *hinterlandnya*. Dalam rangka meningkatkan perkembangan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, fasilitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting. Pembangunan tidak dapat berjalan lancar apabila prasarana kurang memadai. Jadi prasarana dapat dianggap sebagai faktor yang potensial dalam menentukan masa depan perkembangan suatu wilayah perkotaan dan pedesaan.

Jayadinata (1986) mengklasifikasikan prasarana sebagai berikut :

1. Prasarana menurut bentuk, macam dan fungsinya.
 - a. Bentuk prasarana
 - i. Yang berbentuk ruang atau bangunan (*space*)
 - ii. Yang berbentuk jaringan (*network*)
 - b. Macam prasarana
 - i. Prasarana yang berbentuk ruang, meliputi :
 - Perlindungan, yaitu rumah.
 - Pelayanan umum (sosial), misalnya : rumah sakit, perumahan dan sebagainya.
 - Kehidupan ekonomi, misalnya : bank, toko, pabrik, sawah, pasar dan sebagainya.
 - Kebudayaan, misalnya : bangunan pemerintah, sekolah, museum, lapangan olah raga dan sebagainya.
 - ii. Prasarana yang berbentuk jaringan, meliputi :
 - Sistem pengangkutan, misalnya : jaringan jalan, jaringan sungai, dan sebagainya.

- Utilitas umum (*public utility*), misalnya : jaringan pipa air minum, jaringan kawat listrik dan sebagainya.
 - Sistem komunikasi perseorangan dan komunikasi massa, misalnya : jaringan kawat telepon dan sebagainya.
 - Sistem pelayanan dalam kehidupan sosial ekonomi, misalnya : irigrasi dan sebagainya.
- c. Prasarana menurut fungsi, meliputi :
- i. Prasarana sosial (yang berbentuk jaringan atau ruang) terdapat dalam kegiatan : kekeluargaan, pemerintahan, agama, kesehatan, pendidikan, rekreasi, jaminan/bantuan sosial, keamanan dan pertahanan, perhubungan dan komunikasi serta informasi dan data.
 - ii. Prasarana ekonomi (yang berbentuk jaringan atau ruang) terdapat dalam kegiatan pertanian/perkebunan/kehutanan, peternakan/perikanan, industri, konstruksi, bangunan, pariwisata, dan perhotelan, perdagangan dan perusahaan jasa lain, perhubungan dan komunikasi serta informasi dan data.
2. Pembiayaan dan pembuatan serta pemeliharaan prasarana.
- a. Pembiayaan, pertumbuhan dan pemeliharaan prasarana, meliputi :
 - Masyarakat
 - Badan Hukum
 - Pemerintah
 - b. Cara pembuatan prasarana :
 - Teknologi sederhana
 - Teknologi madya
 - Teknologi tinggi

Menurut Huisman (1989) bahwa penyediaan pelayanan secara efisien dan efektif penting dalam pembangunan karena dalam perencanaan fisik memberikan kerangka keruangan bagi kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan demikian pelayanan sosial ekonomi masyarakat sangat diperlukan dalam

mendukung pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada kegiatan sosial dan ekonomi.

Adapun metode yang dapat digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan dan fungsi pelayanan (daya layan) adalah sebagai berikut :

1. Besarnya ketersediaan fasilitas pelayanan dinilai melalui jumlah pelayanan yang ada di setiap daerah, menggunakan metode *scallogram*.
2. Fungsi pelayanan (daya layan) merupakan perbandingan antara ketersediaan fasilitas pelayanan dengan berbagai standar minimum yang mempertimbangkan *reshold* (nilai ambang) untuk setiap pelayanan. Informasi-informasi lain yang diperlukan pada penilaian fungsi pelayanan antara lain mencakup rasio pelayanan terhadap standar, rasio terhadap pengguna aktual, rasio terhadap pengguna potensial dan rasio terhadap penduduk.

Dalam hubungan antara wilayah terdapat pola hubungan tertentu meliputi : *pertama*, hubungan antara *sentral place* dan *hinterland*; *kedua*, hubungan antar pusat-pusat dalam suatu wilayah (interaksi internal) dan *ketiga*, iteraksi eksternal dan hubungan antara pusat-pusat di dalam wilayah dengan wilayah luar (Rondinelli, 1985).

Perencanaan wilayah harus memperhatikan permasalahan yang timbul dimana perencanaan wilayah terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada masalah kota yang bersifat sosial. Titik perhatiannya ditujukan kepada kota besar dan wilayah sekelilingnya yang disebut buriloka (*hinterland*) yang menunjang kota dalam perencanaan kota dan wilayah.
2. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada wilayah yang penduduknya banyak menganggur dan dalam stagnasi industri yang ditekankan pada pengembangan industri.
3. Perencanaan wilayah yang memperhatikan wilayah pedesaan dengan pengembangan tanah bagi sektor pertanian dan rekreasi (perencanaan pedesaan dan wilayah) untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara pedesaan dan perkotaan (Jayadinata, 1986).

Rondinelli (1985) mengungkapkan indeks tingkat perkembangan wilayah (*level of development indexs*) dapat dilihat secara sederhana ada tiga indikator, yaitu :

1. Karakteristik sosial ekonomi dan demografi diukur melalui pendapatan perkapita, kebutuhan fisik minimum, produk domestik bruto, investasi, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, usia harapan hidup, tingkat kematian bayi per 1000 penduduk, jumlah fasilitas kesehatan.
2. Kontribusi industri dan produksi pertanian diukur melalui prosentase penyerapan tenaga kerja, jumlah perusahaan komersial, luas total lahan pertanian, produktivitas pertanian, luas lahan sawah, luas lahan pertanian untuk hidup layak.
3. Transportasi diukur melalui kualitas jalan, kepadatan jalan, tipe jalan dan panjang jalan.

Menurut Muta'ali (2000, dalam Haryanto, A.T, 2006), prinsip utama dalam penentuan indikator tingkat perkembangan wilayah adalah sangat tergantung dari sumber data yang tersedia, semakin banyak dan variatif indikator dan variabel yang digunakan semakin baik dan akurat, dan dalam penentuannya tidak terjadi perhitungan ganda (*double counting*) terhadap variabel yang digunakan.

1.6 Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Evita Rahmawati di Kabupaten Sragen yang memiliki 20 kecamatan dengan judul “Evaluasi Hirarkhi Pusat-Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi di Kabupaten Sragen Tahun 2001”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut : *pertama*, mengetahui potensi fisik dan sosial ekonomi wilayah di Kabupaten Sragen, *kedua*, mengetahui kondisi daya layan dan kebutuhan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Sragen, *ketiga*, menentukan arah dan pengembangan hirarkhi pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Sragen.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif dan model teori tempat sentral dengan modifikasi potensi fisik dan sosial ekonomi wilayah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari instansi terkait. Selain itu juga melakukan observasi langsung kelapangan dengan mewawancarai informan kunci.

Hasil dari penelitian yaitu arahan penentuan pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi berdasarkan pada potensi wilayah, kondisi daya layan dan kebutuhan pelayanan fasilitas sosial ekonomi dan kepadatan penduduk.

Dalam penelitian Aris Tri Haryanto yang dilakukan di kota Boyolali dengan judul “Analisis Pemanfaatan Fasilitas Sosial Ekonomi bagi Penduduk di Kota Boyolali dan Daerah Hinterlandnya Tahun 2006”. Dengan tujuan penelitian : *pertama*, mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas sosial ekonomi di kota Boyolali, *kedua*, mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan atau penggunaan fasilitas sosial ekonomi bagi penduduk di kota Boyolali. Metode penelitian yang digunakan yaitu survei dan analisis data sekunder.

Hasil dari penelitian yaitu tingkat pemanfaatan fasilitas sosial yang berupa pendidikan adalah sedang dan fasilitas kesehatan adalah sedang. Jangkauan penggunaan fasilitas pendidikan dominan penduduk kota Boyolali dan kesehatan dominan penduduk luar kota Boyolali. Tingkat pemanfaatan fasilitas ekonomi adalah tinggi dan jangkauannya dominan digunakan penduduk kota Boyolali.

Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Evita Rahmawati	Aris Tri Haryanto	Suwarno
Judul	Evaluasi Hirarkhi Pusat-Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Sragen Tahun 2001	Analisis pemanfaatan fasilitas sosial ekonomi bagi penduduk di kota boyolali dan daerah hiterlandnya tahun 2006	Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Perkembanganwilayah Di Kabupaten Sragen
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui potensi fisik dan sosial ekonomi wilayah di Kabupaten Sragen. 2. Mengetahui kondisi daya layan dan kebutuhan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Sragen. 3. Menentukan arah dan pengembangan hirarkhi pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Sragen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas sosial ekoonomi di kota Boyolali. 2. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan atau penggunaan fasilitas sosial ekonomi bagi penduduk di kota Boyolali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui ketersediaan fasilitas sosial ekonomi antar kecamatan di daerah penelitian. 2. Mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan ketersediaan pelayanan fasilitas sosiala ekonomi di daerah penelitian. 3. Mengetahui hubungan antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi terhaap perkembangan di wilayah Sragen.
Metode	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data skunder, yaitu mengolah data yang telah tersedia.	Metode penelitian yang digunakan yaitu survei dan analisis data sekunder.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, yaitu mengolah data yang telah tersedia.
Hasil	Arahan penentuan pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi berdasarkan pada potensi wilayah, kondisi daya layan dan kebutuhan pelayanan fasilitas sosial ekonomi dan kepadatan penduduk.	Tingkat pemanfaatan fasilitas sosial yang berupa pendidikan adalah sedang dan fasilitas kesehatanadalah sedang. Jangkauan penggunaan fasilitas pendidikan dominan penduduk kota Boyolali dan kesehatan dominan penduduk luar kota Boyolali. Tingkat pemanfaatan fasilitas ekonomi adalah tinggi dan jangkauannya dominan digunakan penduduk kota Boyolali.	Ketersediaan dan distribusi fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Sragen, tingkat daya layan fasilitas sosial ekonomi, kebutuhan fasilitas sosial ekonomi dan tingkat perkembangan wilayah.

Sumber : Penulis, 2012

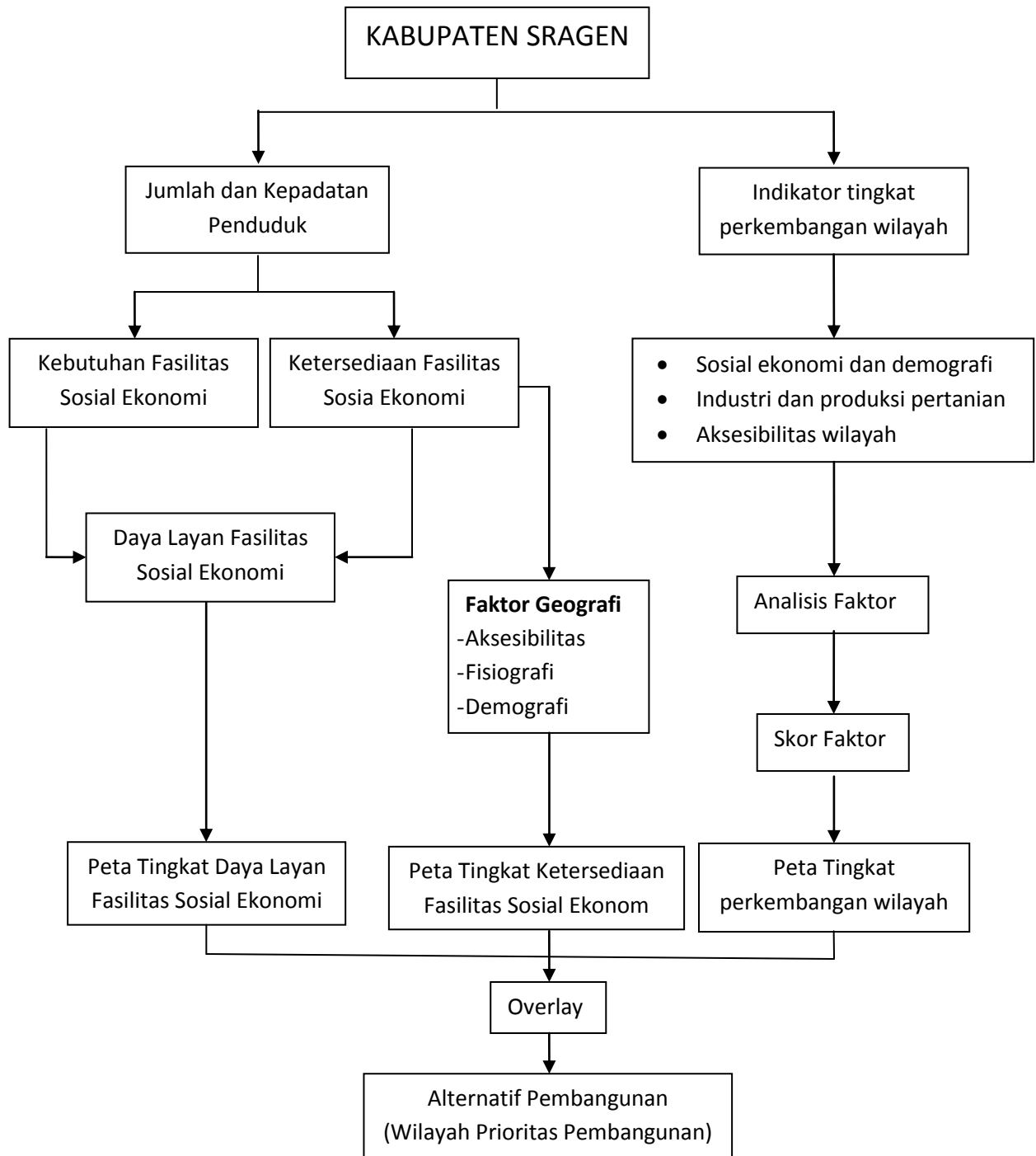
1.7 Kerangka Pemikiran

Perkembangan suatu wilayah didukung oleh ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan indikator pendukungnya harus mampu melayani masyarakat secara adil dan merata. Masing-masing wilayah akan mempunyai suatu sistem yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain termasuk pula jaringan sosial ekonomi maupun interaksi fisik.

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan kondisi fasilitas sosial ekonomi serta hubungannya dengan perkembangan wilayah di setiap kecamatan di Kabupaten Sragen dengan menggunakan skoring dan klasifikasi. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi : *pertama*, menentukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai kondisi fasilitas pelayanan sosial ekonomi wilayah, kemudian menentukan tingkat ketersediaan, kebutuhan dan daya layan fasilitas sosial ekonomi; *kedua*, menentukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah, kemudian mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah serta persebarannya; *ketiga*, menguji korelasi tingkat perkembangan wilayah dengan tingkat ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dan variasi tingkat perkembangan wilayah; *keempat*, mengidentifikasi wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi pengembangan fasilitas sosial ekonomi, konsentrasi penduduk dan tingkat perkembangan wilayah.

Penyebaran penduduk yang belum merata dan bertambahnya penduduk akan menyebabkan bertambahnya pula jumlah fasilitas sosial ekonomi yang diperlukan penduduk. Dan masing-masing kecamatan memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi dalam jumlah yang berbeda-beda sehingga akan menyebabkan terjadinya rangking atau tingkat jumlah fasilitas sosial ekonomi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sragen. Dengan demikian akan dapat dinilai ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di wilayah pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Sragen.

Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian



Sumber : Penulis, 2012

1.8 Hipotesa

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Searah dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin rendah daya layanan fasilitas sosial ekonomi pada setiap kecamatan di Kabupaten Sragen.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi :
 - a. Semakin baik potensi fisik wilayah (seperti luas lahan sawah dan luas lahan kritis) maka semakin tinggi ketersediaan fasilitas sosial ekonomi.
 - b. Semakin baik aksesibilitas (kondisi/kelas jalan) maka semakin tinggi ketersediaan fasilitas sosial ekonomi.
 - c. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka semakin besar ketersediaan fasilitas sosial ekonomi.
3. Semakin tinggi ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, maka tingkat perkembangan wilayah semakin tinggi.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, yaitu mengolah data yang telah tersedia untuk pekerjaan ilmiah tertentu. Data tersebut mungkin hasil survei yang belum diperas dan analisa lanjutannya dapat menghasilkan sesuatu yang amat berguna. Juga dapat berupa studi perbandingan dari studi-studi yang telah dilakukan (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989).

Semua Kecamatan di daerah penelitian dijadikan unit analisis. Penelitian ini juga dilengkapi dengan observasi langsung ke lapangan, serta wawancara dengan berbagai narasumber yang atau informan kunci yang berada pada pemerintahan baik kabupaten maupun kecamatan. Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut :

1.9.1. Pemilihan Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sragen yang meliputi 20 kecamatan. Hal-hal yang menarik dan mendasari pemilihan Kabupaten Sragen sebagai daerah penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, terbatasnya penyediaan fasilitas sosial ekonomi di beberapa kecamatan di daerah penelitian.

Kedua, di 20 kecamatan lokasi penelitian berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan berbeda.

Ketiga, fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang ada, tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk.

1.9.2. Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diterbitkan oleh beberapa instansi pemerintah, yaitu BAPPEDA Tingkat II Sragen dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Sragen. Data-data tersebut meliputi karakteristik fisik, kependudukan, struktur tata ruang dan sosial ekonomi Kabupaten Sragen.

Sedangkan data fasilitas sosial ekonomi yang dipergunakan dapat diperinci sebagai berikut :

1. Fasilitas Sosial
 - a. Fasilitas Pendidikan (TK, SD, SLTP, dan SLTA)
 - b. Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, RS Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotek, dan Poliklinik)
 - c. Fasilitas Ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Kuil, dan Wihara)
 - d. Fasilitas Jasa dan Pemerintah (Kantor Desa, Balai Desa, Kantor Pos, Telepon Umum, dan Hotel)
2. Fasilitas Ekonomi
 - a. Fasilitas Perdagangan (Pasar, Toko, Kios, dan Warung)
 - b. Fasilitas Keuangan (Bank dan Koperasi)

1.9.3. Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu unsur pokok dalam penelitian, dan variabel merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai. Langkah penting dalam penelitian adalah menentukan variabel penelitian, karena suatu unsur fenomena dan paradigma ilmiah hanya dapat dijelaskan apabila diketahui hubungan antara variabel-variabelnya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Pengaruh (*independence variable*)
 - a. Jumlah penduduk
 - b. Kepadatan penduduk
 - c. Potensi fisik dan sosial ekonomi wilayah
2. Variabel Terpengaruh (*dependence variable*)
 - a. Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi
 - b. Daya layan fasilitas sosial ekonomi
 - c. Tingkat perkembangan wilayah

Tabel 1.4 Variabel Penelitian

Faktor	Variabel	Indikator
Demografi	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk
Fasilitas pelayanan sosial	Jumlah fasilitas Pendidikan, Kesehatan Tempat Ibadah	Kebutuhan dan daya layan fasilitas sosial
Fasilitas pelayanan ekonomi	Jumlah fasilitas Perdagangan, Keuangan, Pemasaran	Kebutuhan dan daya layan fasilitas ekonomi

Sumber : Rahmawati, 2001 dengan modifikasi.

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa faktor-faktor utama dalam demografi, fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi yang mempunyai pengaruh. Variabel pengaruh berfungsi untuk menentukan indikator-indikator dalam penelitian tersebut. Misal faktor demografi yang mempunyai variabel pengaruh yang jumlah dan kepadatan penduduk, yang mana variabel pengaruh tersebut merupakan indikator yang menentukan terhadap ketersediaan fasilitas sosial ekonomi pada setiap kecamatan di daerah penelitian.

Sementara itu dalam memperhatikan fasilitas sosial ekonomi diperlukan standar fasilitas sosial ekonomi yang mampu menjelaskan karakteristik pada masing-masing variabel yang telah ditentukan.

Tabel 1.5 Standar Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi

No	Jenis Fasilitas Pelayanan	Jumlah Minimum Penduduk (Jiwa)
1.	Pendidikan	
	a. TK	1000
	b. SD	1600
	c. SLTP	4800
	d. SLTA	4800
2.	Kesehatan	
	a. Balai Pengobatan	3000
	b. BKIA/R.S Bersalin	10.000
	c. Puskesmas	30.000
	d. Puskesmas Pembantu	15.000
	e. RSUD	240.000
	f. Apotek	10.000
3.	Tempat Ibadah, Jasa, dan Pemerintahan	
	a. Masjid/Gereja	30.000
	b. Musholla/Surau/kuil	2.500
	c. Kantor Pos	30.000
	d. Kantor Telepon	30.000
	e. Balai Pemerintahan	2.500
4.	Ekonomi	
	a. Pasar	30.000
	b. Warung	250
	c. Toko/Kios	2.500
	d. Bank/Koperasi	30.000

Sumber : Sutanto, 1993 dalam Rahmawati 2001.

Sedangkan tingkat perkembangan wilayah dalam penelitian ini mengacu pada indikator-indikator terpilih yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah. Menurut Rodenelli indikator-indikator ini digunakan dengan mendasarkan pada kondisi lokal daerah

penelitian dan ketersediaan data yang digunakan. Indikator, variabel dan asumsi yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.6 Indikator Tingkat perkembangan Wilayah dan Asumsinya

Indikator	Variabel	Asumsi
Sosial Ekonomi dan Demografi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk - Kepadatan penduduk - Pertumbuhan penduduk - Jumlah usia produktif - % rumah dengan aliran listrik - % Rt mempunyai TV - % rumah permanen - Daya layan fasilitas sosial ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tinggi aglomerasi penduduk di suatu wilayah, tingkat perkembangan wilayah semakin tinggi. - Semakin besar usia produktif di suatu wilayah, semakin baik potensi SDM-nya, tingkat perkembangan wilayah semakin tinggi - Semakin tinggi % rumah dengan aliran listrik, % RT yang mempunyai TV dan % rumah permanen, tingkat perkembangan wilayah semakin tinggi. - Semakin tinggi daya layan fasilitas sosial ekonomi, tingkat perkembangan wilayah semakin tinggi.
Industri dan Produksi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah industri/1000 penduduk - % luas sawah pertanian irigrasi - % penduduk non tani 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin banyak jumlah industri di suatu wilayah akan meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat sehingga tingkat perkembangan wilayah semakin tinggi. - Semakin tinggi luas sawah pertanian irigrasi akan menunjukkan tingkat teknologi yang digunakan semakin maju sehingga tingkat perkembangan wilayah semakin tinggi. - Semakin tinggi % penduduk non tani maka tingkat perkembangan wilayah semakin tinggi
Aksesibilitas Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - % panjang jalan - Jumlah sarana angkutan roda 4/1000 penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tinggi % panjang dan jumlah angkutan roda 4, aksesibilitas semakin baik, tingkat perkembangan wilayah semakin tinggi.

Sumber : Rondinelli (1985)

1.9.4 Klasifikasi dan Skoring

Klasifikasi dan skoring digunakan untuk mengetahui perbedaan potensi wilayah tentang ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Sragen. Klasifikasi hasil pengukuran diklasifikasikan dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi untuk membuat perbedaan antara wilayah melalui pengkelasan setiap variabel. Skoring yaitu memberikan skor relatif dari 1 sampai 3 pada hasil klasifikasi pada setiap variabel.

$$\text{Kelas} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{3}$$

Hal ini dilakukan dengan skoring variabel potensi untuk tiap wilayah, penjumlahan skor, klasifikasi jumlah skor dan pembuatan rangking hasil identifikasi potensi yang akan menunjukkan perbedaan tinggi rendahnya potensi wilayah pada masing-masing kecamatan. Skoring variabel merupakan pemberian skor pada setiap variabel berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Skoring dilakukan dengan cara memberikan skor relatif dari 1 sampai dengan 3 pada hasil klasifikasi pada setiap variabel.

Misal jumlah masjid di suatu Kecamatan A = 100, Kecamatan B = 25, dan Kecamatan C = 55. Dengan perhitungan rumus di atas dapat diketahui interval kelas = 25, maka dapat kita tentukan klasifikasinya sebagai berikut :

Kelas I	25 – 50	(rendah)
Kelas II	50 – 75	(sedang)
Kelas III	75 – 100	(tinggi)

Dengan demikian dapat diperoleh bahwa ketersediaan jumlah masjid di Kecamatan A termasuk kategori tinggi, Kecamatan B termasuk kategori rendah, dan Kecamatan C termasuk kategori sedang.

Setelah proses skoring selesai, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai skor dan pembuatan rangking skor untuk melihat perbedaan potensi pada masing-masing wilayah kecamatan.

Sementara untuk menentukan besarnya ketersediaan, kondisi daya layan dan kebutuhan fasilitas sosial ekonomi serta perkembangan wilayah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Ketersediaan Fasilitas Sosial Ekonomi

Untuk menilai ketersediaan fasilitas sosial ekonomi digunakan teknik *scallogram*. Tahap analisis *scallogram* adalah sebagai berikut :

- a. Mengurutkan wilayah menurut besarnya jumlah penduduk pada kolom *scallogram*.
- b. Inventarisir jenis-jenis pelayanan pada baris *scallogram*.
- c. Mengisi jumlah unit-unit pelayanan pada sel-sel tabel *scallogram* sesuai nama kecamatan dan jenis pelayanannya.
- d. Menjumlahkan jenis dan unit pelayanan pada masing-masing wilayah (horizontal).
- e. Mengurutkan wilayah menurut rangking berdasarkan jumlah, jenis dan unit pelayanan.
- f. Menjumlahkan jenis dan unit pelayanan pada seluruh wilayah (vertikal).
- g. Mengurutkan rangking pelayanan menurut besarnya jumlah jenis dan jumlah unit pelayanan.
- h. Memetakan hasilnya untuk mengetahui pola keruangan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi.

2. Kebutuhan Fasilitas Sosial Ekonomi

- a. Menghitung tingkat pertumbuhan penduduk untuk periode 5 tahun yaitu dari tahun 2006-2011 dengan cara geometri.
- b. Memproyeksikan penduduk berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk tahun 2011-2016 dengan menggunakan model geometri.

$$P_t = P_0 (1+r)^t$$

P_t = jumlah penduduk pada tahun 1

P_0 = jumlah penduduk pada awal tahun

r = pertumbuhan penduduk

t = interval tahun

3. Tingkat Daya Layan Fasilitas Sosial Ekonomi

Diukur dari rasio antara jumlah unit riil dibagi jumlah unit minimum fasilitas sosial ekonomi kemudian di skor.

Jumlah unit riil : jumlah unit fasilitas sosial ekonomi pada masing-masing kecamatan.

Jumlah unit minimum : jumlah penduduk dibagi jumlah penduduk minimum untuk mendukung suatu fasilitas.

Nilai daya layan fasilitas sosial ekonomi dalam suatu wilayah merupakan hasil nilai komposit nilai-nilai skor pada masing-masing jenis pelayanan yang dihitung pada tiap-tiap unit analisis. Berdasarkan total komposit dibuat kelas daya layan fasilitas sosial ekonomi di Kabupaen Sragen yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Variasi dan pola keruangan dari daya layan fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Sragen secara otomatis akan ditampilkan dalam bentuk peta dan kemudian dapat dianalisis. Skor tingkat daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi untuk setiap fasilitas adalah sebagai berikut :

0	-	< 0,5	1 (rendah)
0,5	-	< 1	2 (sedang)
		≥ 1	3 (tinggi)

4. Perkembangan Wilayah

Dalam menentukan tingkat perkemabangan wilayah menggunakan metode analisis faktor (Muta'ali, 2000 dalam

Hermaputra, 2003) dengan modifikasi indikator-indikator terpilih untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah menurut Rondinelli seperti pada tabel 1.5 dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Menentukan indikator perkembangan wilayah.

Hal ini meliputi data sosial ekonomi, demografi, industri dan produksi pertanian serata aksesibilitas wilayah dan komunikasi.

- b. Mengumpulkan dan mengisi data ke dalam tabel.

Memasukan data kedalam tabel yang telah disiapkan, dimana tabel terdiri dari baris (sub wilayah) dan kolom yang berisi indikator terukur.

- c. Pemberian Nilai.

Masing-masing variabel diberi nilai, dengan cara mengklasifikasikan menjadi tiga kategori tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya diberi nilai tinggi = 1, sedang = 2, dan rendah = 3.

- d. Pemberian bobot untuk setiap indikator.

Masing-masing indikator diberikan bobot dengan asumsi besar bobot adalah sama.

- e. Menghitung indeks perkembangan wilayah (komposit).

Nilai dari setiap indikator, setelah dikalikan dengan bobotnya, dijumlahkan dan hasilnya merupakan indeks komposit tingkat perkembangan wilayah.

- f. Interpretasi Hasil.

Hasil diketahui dengan melihat tingkat perkembangan wilayah yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

1.9.5 Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini di analisa dengan menggunakan analisi statistik yaitu analisis korelasi.

Uji statistik yang digunakan adalah analisis statistik korelasi *Product Moment* dari Pearson. Tujuannya untuk mengetahui hubungan

antara variabel uji dari statistik ini diterapkan untuk menguji hipotesis. *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. Dan untuk menguji hipotesis *ketiga*, bagaimana hubungan antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dengan tingkat perkembangan wilayah.

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\}} \sqrt{\{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Dimana :

r = koefisien korelasi

x = variabel bebas

y = variabel tak bebas

N = jumlah subyek yang diteliti

Nilai r terletak antara -1 dan +1 ($-1 < r < +1$).

Untuk mempermudah dalam analisis statistik korelasi *Product Moment* dari Pearson maka ditentukan variabel sebagai berikut :

Tabel 1.7. Variabel Bebas dan Variabel Tak Bebas

No	Variabel Bebas	Variabel Tak Bebas
1.	Kepadatan Penduduk	Jumlah fasilitas sosial ekonomi
2.	Kepadatan penduduk	Daya layan fasilitas sosial ekonomi
3.	Kebutuhan fasilitas sosial ekonomi	Daya layan fasilitas sosial ekonomi
4.	Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi	Tingkat perkembangan wilayah
5.	Tingkat daya layan fasilitas sosial ekonomi	Tingkat perkembangan wilayah

Sumber : Penulis, 2012

1.10 Batasan Oprasional

Evaluasi adalah menilai antara fasilitas sosial ekonomi yang ada (riil) dengan standarisasi fasilitas sosial ekonomi berdasarkan pedoman dari Direktorat Tata Kota dan Daerah (DPU, 1983 dan Sutanto dkk 1993 dalam Hermaputra, Y. 2003).

Fasilitas adalah keseluruhan dari sarana prasarana (Jayadinata, 1986)

Fasilitas Sosial adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau diarahkan oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk memperbaiki tingkat kehidupan penduduk (Huisman, 1987).

Fasilitas Ekonomi adalah segala fasilitas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh nyata menurut fungsi ekonomi kepada penggunaannya (Conyers, 1991)

Fasilitas Pendukung (infrastruktur) adalah alat (mungkin tempat) yang paling utama, dalam kegiatan sosial atau kajian ekonomi bagi masyarakat (Jayadinata, 1986)

Hirarki Wilayah yaitu suatu wilayah meliputi *gegend*, *landscafsteil*, *landsceft*, *landsteil*, dan *land* yang secara berurutan mencerminkan orde dari suatu wilayah (Yunus, 1991).

Kebutuhan Fasilitas Sosial Ekonomi adalah jumlah fasilitas sosial ekonomi yang harus tersedia yang dapat memenuhi jumlah penduduk yang ada (Huisman, 1987).

Ketersediaan Fasilitas Sosial Ekonomi adalah jumlah fasilitas sosial ekonomi yang tersedia disuatu wilayah (Sutanto, dkk, 1993 dalam Hermaputra, Y. 2003).

Pengembangan adalah memajukan atau memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada (Jayadinata, 1991).

Tingkat Daya Layan Fasilitas Sosial Ekonomi adalah rasio antara jumlah fasilitas sosial ekonomi riil dengan jumlah fasilitas sosial ekonomi minimum untuk melihat kemampuan fasilitas tersebut dalam

memenuhi kebutuhan penduduk (Sutanto, dkk, 1993 dalam Hermaputra, Y. 2003).

Tingkat Perkembangan Wilayah merupakan wujud dan hasil pembangunan (Tjokroamidjojo, 1983 dalam Hermaputra, Y. 2003) yang dapat diukur dari indikator sosial ekonomi dan demografi, industri dan produksi pertanian serta aksesibilitas wilayah dengan menggunakan analisis faktor yang dinyatakan dalam urutan rangking yang secara relatif mencerminkan kemajuan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.